SALINAN

KEPALA DESA
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA CIPEDES
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPEDES,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;

b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa;

d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Keluarahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor);
17. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/31/KEC/2006 2006 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa CIPEDES Kecamatan Paseh Periode 2006-2012;
18. Keputusan Camat Paseh Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa CIPEDES Kecamatan Paseh Periode 2006-2012;
19. Peraturan Desa CIPEDES Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa CIPEDES;
20. Peraturan Desa CIPEDES Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa CIPEDES ;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEDES

dan

KEPALA DESA CIPEDES

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPEDES TENTANG RENCANA PEBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2014-2019 DESA CIPEDES KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa CIPEDES dan Badan Permusyawaratan Desa CIPEDES dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan BPD;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Rencana Pembangunan jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM / LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintaha desa;
(2) Dalam menyusun RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
(3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
(4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
(5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM-Desa;
(6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
(7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : CIPEDES
Pada Tanggal : 2018

KEPALA DESA CIPEDES

ttd

UJANG SULAEMAN.SH

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG

NO	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RW,RT,Kp, Dusun dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Ket.
						B	L	R	P		Rp.	Sumber	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
JUMLAH					**-**								

Ketua LPM / LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

USEP USMAN

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN 2015

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG

NO	Program	Kegiatan	Lokasi (RW,RT,Kp, Dusun dll)	Sifat				Sasaran Manfaat	Perkiraan Biaya APBN/APBD/ APB-DESA	SKPD	Ket.
				B	L	R	P				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
JUMLAH											

Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

Ketua LPM / LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

USEP USMAN

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG

NO	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan (1.Sawadaya, 2.Kemitraan, 3.Pemerintah /TP)
1	*2*	*3*	*4*
JUMLAH			

Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

Ketua LPM / LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

USEP USMAN

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG
TAHUN : 2018

NO	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RW,RT,Kp, Dusun dll)	Sifat				Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Ket.
	Bidang	Jenis		B	R	L	P				Jml (Rp)	Sumber	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
JUMLAH													

Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULEMAN SH

Ketua LPM / LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

USEP USMAN

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA TAHUN 2014 s.d 2019

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Masalah	Kriteria dan Nilai Pembobotan					Jumlah Nilai	Urutan Peringkat	Ket.
		Dirasakan oleh orang banyak	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan pendapat	Sering terjadi	Kriteria lainnya			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

CIPEDES, ... 2018
Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

NO	Indikasi Program	Lokasi garapan	Perkiraan sasaran	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*

CIPEDES, ... 20148
Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

7. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RW/ RT

DESA : CIPEDES
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG

NO	Program	Kegiatan	Lokasi (RW,RT,Kp, Dusun dll)	Sasaran	Volume	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		SKPD pengusul	Pelaksana
						B	L	R	P		Rp.	Sumber		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Pembangunan Fisik	Kirmir selokan	RW.01 Desa CIPEDES	Pertanian	400mx0,5x1m	v	-	-	-		100.000.000	P4	SDAPE	LPMD
2	Pembangunan Fisik	Rutilahu	RW.01 Desa CIPEDES	Pemukiman	10 unit	-	-	v	-		50.000.000	APBD	Dispertasih	LPMD
3	Pembangunan Fisik	MCK	RW.01 Desa CIPEDES	Kesehatan lingkungan	2 Unit	v	-	-	-		10.000.000	ADD	Dispertasih	LPMD
4	Perekonomian	Pengadaan Kerbau	RW.01 Desa CIPEDES	Peternakan	5 ekor	v	-	-	-		30.000.000	APBD	Disnakan	TPKD
5	Perekonomian	Pengadaan Domba	RW.01 Desa CIPEDES	Peternakan	15 ekor	v	-	-	-		15.000.000	APBD	Disnakan	TPKD
6	Perekonomian	Pengadaan Log jamur	RW.01 Desa CIPEDES	Budidaya UKM	10.000 log	v	-	-	-		30.000.000	APBD	Distanhutbun	TPKD
7	Perekonomian	Pengadaan Mesin jahit	RW.01 Desa CIPEDES	UKM	5 Unit	v	-	-	-		7.500.000	APBD	Diskop & UKM	TPKD
8	Pembangunan Fisik	Pemb Posyandu	RW.02 Desa CIPEDES	Kesehatan	1 unit (4x6m)	V	-	-	-		20.000.000	ADD	Dinas Kes.	TPKD
9	Pembangunan Fisik	Pemb Mesjid Jami	RW.02 Desa CIPEDES	Keagamaan	11 x 11 m	-	V	-	-		50.000.000	P4	Din Kesos	TPKD
10	Pembangunan Fisik	Rutilahu	RW.02 Desa CIPEDES	Pemukiman	3 unit	-	-	V	-		15.000.000	P4	Dispertasih	TPKD
11	Pembangunan Fisik	Kirmir	RW.02 Desa CIPEDES	Lingkungan	1000 m	V	-	-	-		100.000.000	P4	Dispertasih	TPKD
12	Perekonomian	Pengolahan makanan	RW.02 Desa CIPEDES	UKM	10 orang	v	-	-	-		50.000.000	APBD	Dinkop&UKM	TPKD

NO	**Program**	**Kegiatan**	**Lokasi (RW,RT,Kp, Dusun dll)**	**Sasaran**	**Volume**	**Sifat**				**Waktu Pelaksanaan**	**Biaya**		**SKPD pengusul**	**Pelaksana**
						B	**L**	**R**	**P**		**Rp.**	**Sumber**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*

JUMLAH				-										

Kepala Desa CIPEDES

UJANG SULAEMAN SH

Ketua LPM / LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

.....

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA DAN RKP-DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2018 di Desa CIPEDES Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal :
Jam / Pukul :
Tempat : Ruang Musyawarah Desa CIPEDES

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah ;

A. Materi atau Topik :

……
……
……
……
……

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : AGUS DEVI dari Perangkat Desa (Sekdes)
Sekretaris / Notulen : DEWI PURNAMA SARI dari Perangkat (Kaur Umum)
Nara sumber : 1. UJANG SULAEMAN SH dari Kepala Desa
2. UU DJAENUDIN dari BPD (Ketua BPD)
3. EVI LATIPAH dari Kelembagaan (Ketua TP PKK)
4. H. Agus D. Lucananta (Kasi PMD Kec Paseh)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa*** yaitu :

……
……
……
……

……

……

……

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara voting *).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CIPEDES, Januari 2018

Pimpinan Musrenbang, Notulen,

AGUS DEVI **USEP USMAN**

Mengetahui :
Kepala Desa CIPEDES,

UJANG SULAEMAN SH

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			